

## DPD Pecat Fadel Muhammad dari Posisi Pimpinan MPR

JAKARTA (IM) - Sidang Paripurna ke-2 DPD RI Masa Sidang 1 Tahun Sidang 2022-2023, mayoritas Anggota DPD RI menyampaikan mosi tidak percaya dan ingin mencopot Fadel Muhammad dari jabatan Wakil Ketua MPR dari unsur DPD RI.

"Dalam Sidang Paripurna ke-13 DPD RI Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022, diputuskan bahwa mosi tidak percaya akan diteruskan ke Badan Kehormatan dan kelompok DPD RI," kata Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Matliti didampingi Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Mahyudin dan Sultan B Najamudin, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/8).

LaNyalla menjelaskan, dalam perkembangannya, mosi tidak percaya yang awalnya ditandatangani 91 anggota DPD RI bertambah menjadi 97 anggota yang membubuhkan tanda tangan. Untuk itu, Paripurna

DPD menetapkan penarikan dukungan kepada Fadel sebagai Pimpinan MPR.

Pimpinan sidang memutuskan pemilihan pengganti Fadel dilakukan dengan mekanisme voting yang diikuti sebanyak anggota 96 anggota DPD RI.

"Akhirnya dengan mengantongi 39 suara Tamsil Linrung diputuskan sebagai Wakil Ketua MPR utusan DPD RI pengganti posisi Fadel Muhammad," ujar Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono.

Sedangkan kandidat lainnya Bustami Zainudin memperoleh 21 suara, Yorrys Raweyai 19 suara dan Abdullah Puteh 14 suara. Sementara terdapat 2 suara tidak sah dan 1 abstain. Sebelumnya, Fadel Muhammad dalam sidang tersebut menolak atas mosi tidak percaya tersebut. Fadel merasa dirinya tidak berbuat hal-hal yang melanggar. Fadel dan tim hukum juga akan melaporkan ke polisi atas pencemaran nama baik. ● han

## Tahun Depan, PDI-P Prediksi Jokowi Bakal Ganti Menteri yang Maju Capres

JAKARTA (IM) - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memperkirakan tahun depan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali merombak anggota kabinet atau reshuffle menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

Alasannya, beberapa menteri dinilai fokus menjadi calon presiden (capres) pada Pemilu 2024.

"Jadi perombakan ya sah-saja. Apalagi kan nanti di bulan September saya pastikan, sudah pasti ada paling tidak kan yang sudah *declare* kan Pak Prabowo. Kan *enggak* mungkin jadi Menhan (Menteri Pertahanan) lagi kan, September 2023," kata Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDI-P Bambang Wuryanto di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/8).

Selain Prabowo, Pacul juga mengungkapkan kemungkinan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga terkena *reshuffle* pada 2023. Hal itu akan terjadi jika Airlangga mendeklarasikan diri maju pada Pilpres 2024 dari partainya, Golkar.

"Iya dong (Airlangga di *reshuffle*), apabila mendaftar (Pilpres)," tutur Ketua Komisi III DPR itu.

Kendati demikian, Pacul menyerahkan sepenuhnya soal reshuffle kepada Presiden. Sebab, dia menilai Presiden yang lebih memahami soal perombakan kabinet.

"Beliau lebih paham pembantu-pembantuannya. Beliau lebih paham pandangan ke depan. Kalau beliau melakukan (*reshuffle*) supaya bisa menjawab tantangan di depan, kemudian melakukan *reshuffle* ya dia punya kewenangan," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, *reshuffle* kabinet masih memungkinkan untuk dilakukan kembali. Hal itu merujuk pada kondisi perubahan dunia yang serba mendadak akhir-akhir ini.

Jokowi menekankan diperlukan kebijakan yang cepat dan tepat dari para menteri. Jokowi menegaskan, apabila ke depannya diperlukan reshuffle untuk kepentingan lebih baik maka akan dilakukan.

"Kalau diperlukan untuk kepentingan lebih baik, ya dilakukan. Meskipun tinggal sehari, kalau diperlukan, ya dilakukan," kata Jokowi dalam sesi wawancara khusus bersama Harian Kompas di Istana Merdeka pada 14 Agustus 2022, sebagaimana dilansir pada Kamis (18/8). ● mar



FOTO: ANT

## KASUS KORUPSI PENGADAAN HELIKOPTER AGUSTAWESTLAND

Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter AW-101 Irfan Kurnia Saleh alias Jhon Irfan Kenway berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (19/8). Direktur PT Diratama Jaya Mandiri dan pengendali PT Karsa Cipta Gemilang itu menjalani pemeriksaan lanjutan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter angkut AgustaWestland tipe AW-101 di TNI AU pada 2016-2017.

## PT KAI Ancam Pidanakan Pelaku Pelemparan Batu ke Kereta Api

JAKARTA (IM) - PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengancam aksi pelemparan batu ke arah KA Argo Parahyangan oleh sejumlah pemuda di kawasan Gunung Antang, Matraman, Jakarta Timur.

Kepala Humas PT KAI Daop 1 Jakarta Eva Chaerunisa mengatakan, aksi tersebut sangat berbahaya dan melanggar hukum.

"Daop 1 Jakarta mengancam aksi pelemparan batu yang terjadi pada video tersebut, karena tindakan itu dapat membahayakan perjalanan dan dapat menimbulkan korban," ujar Eva, dalam keterangannya, Jumat (19/8).

PT KAI akan melaporkan pelaku pelemparan batu maupun tindakan vandalisme ke kepolisian. Para pelaku dapat dijerat dengan Pasal 194 Ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Larangan pelemparan terhadap kereta api juga telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkera-taapian," ungkap Eva.

Dalam Pasal 180 UU Perkera-taapian disebutkan, setiap orang dilarang menghilangkan, merusak, atau melakukan perbuatan yang mengakibatkan rusak dan/atau tidak berfungsinya Prasarana dan Sarana Perkera-taapian. Video yang memperlihatkan sejumlah pemuda melempari kereta dengan batu beredar di media sosial. Tiga pemuda duduk area perlintasan kereta kawasan Gunung Antang. Kemudian, mereka melempar batu beberapa kali ke KA jarak jauh yang melintas.

Pada keterangan video disebutkan, rangkaian kereta yang sedang melintas itu adalah KA Argo Parahyangan. Kepala Kepolisian Sektor Matraman, Kompol Tedjo Asmoro mengatakan, polisi sudah mendatangi lokasi kejadian. Namun, polisi belum mendapatkan informasi soal keberadaan para pemuda tersebut.

"Kami sudah cek di sekitar lokasi, enggak ada info. Bisa juga (itu pemuda) dari seberang Jatinegara," kata Tedjo. ● mei

# 2 Polhukam

FOTO: ANT



## KEDATANGAN PRAJURIT RAIDER KHUSUS TNI DI ACEH DARI PAPUA

Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Mohamad Hasan (tengah) menyala-mi prajurit Raider Khusus TNI usai turun dari kapal TNI Angkatan Laut di Pelabuhan Umum Krung Geukuh, Aceh Utara, Aceh, Jumat (19/8). Sebanyak 450 orang prajurit elite TNI dari Satgas Pamtas Penyangga (Mobile) Batalyon Infanteri Raider Khusus 114/Satria Musara tiba kembali di Aceh setelah satu tahun menjalankan tugas menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI di Papua.

# KPK Telisik Laporan Dugaan Suap kepada Staf LPSK oleh Ferdy Sambo

Walau petugas LPSK menolak amplop pemberian Irjen Ferdy Sambo, tetapi upaya yang dilakukan itu sudah termasuk ke dalam pelanggaran pidana.

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan verifikasi penelaahan atas laporan dugaan upaya pemberian suap yang dilakukan oleh mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo kepada petugas

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Nantinya, lembaga antirasuah tersebut juga akan melakukan koordinasi dengan pihak pelapor.

"Saat ini masih verifikasi telaahan dan nanti ada komu-

nikasi dan koordinasi dengan pelapor," ujar Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (19/8).

Ali mengatakan, pada dasarnya penegak hukum wajib untuk melakukan verifikasi laporan, hal itu nantinya akan menjadi dasar hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi lainnya.

"Penegak hukum itu wajib, ya, wajib kemudian nanti melakukan verifikasi. Artinya

apa? Nanti pelapor pasti akan dihubungi oleh tim pengaduan masyarakat KPK dalam rangka verifikasi laporannya," terangnya.

Menurutnya, butuh waktu sekitar 30 hari untuk melakukan proses pemeriksaan terhadap berkas laporan yang diajukan oleh pelapor ke KPK. "Berapa waktu lamanya waktu itu yang dibutuhkan? Kalau di peraturan pemerintah adalah 30 hari kerja. Artinya begini, kami butuh waktu tentunya ketika menerima laporan dari masyarakat tidak begitu saja kemudian selesai. Butuh waktu," ujarnya.

Sebelumnya, Tim Advokat Penegakan Hukum dan Keadilan (Tampak) melaporkan Irjen Ferdy Sambo ke KPK. Tampak menilai suap yang dicoba dilakukan Sambo merupakan perintangan penyidikan (*obstruction of justice*) perkara pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Perwakilan Tampak Judianto Simanjuntak

menyebut perkara dugaan suap itu penting diusut oleh KPK.

Sebelumnya Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Eva Achjani Zulfa, menilai perbuatan upaya percobaan pemberian amplop berisi uang yang diduga dilakukan Irjen Ferdy Sambo kepada petugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sudah melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (T'ipikor).

Menurut Eva, walau petugas LPSK menolak amplop itu, tetapi upaya yang dilakukan itu sudah termasuk ke dalam pelanggaran pidana.

"Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau pejabat negara untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya, meski ditolak oleh pejabat tersebut, adalah tindak pidana suap seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi," kata Eva. ● han

## Dilarikan di ICU, Tersangka Korupsi Rp78 T Surya Darmadi Batal Diperiksa KPK

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) batal melakukan pemeriksaan terhadap Surya Darmadi sebagai tersangka dalam kasus korupsi di Kejaksaan Agung (Kejagung) hari ini, Jumat (19/8).

Surya Darmadi gagal diperiksa karena sakit dan tengah menjalani perawatan di ICU RS Adhyaksa.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan, KPK batal memeriksa Surya Darmadi karena sakit. Pembatalan semata-mata dilakukan atas dasar rasa kemanusiaan.

"Sehingga pemeriksaan terhadap tersangka SD dalam proses penyidikan oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah dijadwalkan pada Jumat 19 Agustus 2022 bertempat di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) ditunda hingga kondisi kesehatan tersangka SD pulih kembali dan siap untuk menjalani pemeriksaan lanjutan," kata Ketut Jumat (19/8).

Sebelumnya, penyidik KPK berencana memeriksa tersangka Surya Darmadi di Gedung Jampidsus, Kejaksaan Agung pada Jumat (19/8). Surya Darmadi di-

periksa sebagai salah satu dari empat tersangka dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada tahun 2014 terkait proses hukum pemilik PT Duta Palma Group.

Di KPK Surya Darmadi tengah terlibat kasus korupsi alih fungsi hutan di Provinsi Riau pada Kementerian Kehutanan oleh PT Duta Palma Group. Lembaga Antirasuah itu menetapkan empat tersangka. Yakni eks Legal Manager PT Duta Palma Group, Suheri Terta; Pemilik Darmex Group atau PT Duta Palma, Surya Darmadi.

Kasus ini merupakan pengembangan dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) pada 2014. Dalam OTT tersebut, KPK menetapkan Gubernur Riau 2014-2019 Annas Maamun dan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Medali Emas Manurang sebagai tersangka.

Tersangka Surya Darmadi diduga merupakan beneficial owner sebuah korporasi. Pertanggungjawaban pidana juga dikenakan pada korporasi.

Sebelumnya Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan akan berkoordinasi dengan KPK untuk melaku-

kan pemeriksaan terhadap Surya Darmadi.

"Memang iya, kita akan kerja sama dengan KPK, karena ada perkara juga yang ditangani KPK," kata Jaksa Agung Burhanuddin di kantornya, Senin (15/8/2022).

Kuasa Hukum Surya Darmadi, Juniver Girsang mengatakan akan mengikuti semua proses hukum di Indonesia termasuk di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kliennya datang dari Taipei, pada Senin (15/8).

Kejagung menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka pada Senin, 1 Agustus 2022. Surya dijerat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Surya juga dikenakan Pasal 3 jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kasus rasuah ini mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp78 triliun. ● han

## Wapres Ingatkan Parpol Jangan Gunakan Politik Identitas saat Kampanye Pemilu 2024

JAKARTA (IM) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengingatkan semua partai politik (parpol) tidak menggunakan politik identitas pada kampanye Pemilu 2024. Hal ini agar tidak menimbulkan konflik akibat perbedaan pilihan.

Ma'ruf Amin menilai masyarakat saat ini sudah cerdas dalam menentukan pilihan saat Pemilu.

"Sebenarnya rakyat kita sekarang itu sudah pandai, sudah cerdas. Menurut saya, ketika semua pihak sudah menyampaikan seruannya dan juga pimpinan-pimpinan partai tidak menggunakan apakah itu misalnya dalam arti identitas agama, kesukuan, juga ya kelompok yang apa ya yang eksklusif, saya kira kalau saya lihat dari berbagai kampanye yang sudah dikembangkan, sebenarnya masyarakat sudah paham itu," katanya, dikutip dari keterangan resminya, Jumat (19/8).

Ia menegaskan sebaiknya politik identitas ini tidak menjadi isu sehingga menimbulkan konflik di masyarakat.

"Sebaiknya memang tidak menjadi isu. Tapi tentu saja orang kalau milih itu ada kecenderungan. Tetapi

dalam mengampanyekan mungkin sebaiknya jangan sampai ada, dihindari, jangan sampai ada kampanye yang menggunakan identitas," tuturnya.

Ma'ruf mengatakan berbeda pilihan pada saat Pemilu tidak menjadi masalah. Namun, yang harus dihindari adalah kampanye dengan membawa identitas.

"Tapi ketika orang memilih mau tidak mau ada perasaan, ini saya lebih dekat, lebih sama pandangnya, lebih suka karena dia lebih baik, baik-baik ini. Kadang-kadang juga menurut ini lebih baik ini, karena ini, ini, ini. Saya kira ketika itu jatuh pada pilihan itu, tidak ada masalah," ucapnya.

"Tapi yang harus dihindari adalah ketika mengampanyekan itu jangan membawa aspek (identitas). Kalau itu, terus kita kumandangkan, saya kira masyarakat kita akan (paham)," katanya. ● han

Ia berharap perbedaan pilihan pada Pemilu 2024 tidak akan menjadi konflik. "Saya kira kita juga berharap, mulai 2024 ini tidak ada konflik karena ada perbedaan pilihan. Tidak menjadi sumber konflik," tuturnya. ● han



FOTO: ANT

**PERTEMUAN BILATERAL MENKOMINFO INDONESIA DAN MALAYSIA**  
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate (kanan) memberikan cinderamata kepada Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia Tan Sri Annuar Musa (kiri) saat melakukan pertemuan bilateral di Kantor Kementerian Kominfo, di Jakarta, Jumat (19/8). Dalam pertemuan bilateral tersebut kedua menteri mendiskusikan berbagai hal termasuk infrastruktur dan tata kelola ruang digital.

PT Mitra Teknologi Niaga ("Perseroan") Pengumuman Rencana Pengambilalihan Saham
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan bahwa pemegang saham Perseroan berencana untuk mengalihkan seluruh dan/atau sebagian besar hak kepemilikan atas saham Perseroan kepada pihak ketiga.
Pengalihan atas saham diatas merupakan pengambilalihan langsung dari pemegang saham sebagaimana diatur di dalam Pasal 125 ayat (1) UUPT. Kreditor yang berkeberatan dengan rencana pengambilalihan saham-saham Perseroan tersebut diatas, bila ada, selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal Pengumuman ini dapat mengajukan keberatan secara tertulis berikut bukti-bukti yang sah kepada Direksi Perseroan, melalui alamat berikut ini: PT Mitra Teknologi Niaga
Alamat : Mayapada Tower Lantai 11, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 26, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan Jakarta, 20 Agustus 2022 Direksi PT Mitra Teknologi Niaga

PT Solusi Teknologi Niaga ("Perseroan") Pengumuman Rencana Pengambilalihan Saham
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan bahwa pemegang saham Perseroan berencana untuk mengalihkan seluruh dan/atau sebagian besar hak kepemilikan atas saham Perseroan kepada pihak ketiga.
Pengalihan atas saham diatas merupakan pengambilalihan langsung dari pemegang saham sebagaimana diatur di dalam Pasal 125 ayat (1) UUPT. Kreditor yang berkeberatan dengan rencana pengambilalihan saham-saham Perseroan tersebut diatas, bila ada, selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal Pengumuman ini dapat mengajukan keberatan secara tertulis berikut bukti-bukti yang sah kepada Direksi Perseroan, melalui alamat berikut ini: PT Solusi Teknologi Niaga
Alamat : Jl. Puri Mutiara II No. 34A, Cilindak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan Jakarta, 20 Agustus 2022 Direksi PT Solusi Teknologi Niaga